

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan teknologi informasi di era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri merupakan suatu kebutuhan yang penting baik bagi individu maupun organisasi modern. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi, individu maupun organisasi dapat melakukan setiap kegiatannya lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, saat ini individu maupun organisasi berlomba-lomba menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang secara pesat. Perkembangan teknologi akan diikuti oleh perkembangan sistem informasi. Menurut (Wikipedia: 2015)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007) menerangkan bahwa Sistem Informasi juga berperan dalam bidang akuntansi. *Statement of Financial Accounting Concept No. 2, Financial Accounting Standard Board* mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Standar akuntansi keuangan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akan memberikan kemudahan bagi para akuntan manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan teruji sehingga akan membantu pengambilan keputusan. *American Institute of*

Certified Public Accountants (AICPA) baru-baru ini telah membuat sertifikasi baru yaitu *Certified Information Technology Professional* (CITP). CITP mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan yaitu akuntan yang memiliki pengetahuan luas di bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi. Hal ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi atau sistem informasi dan hubungannya dengan akuntansi.

Semakin pentingnya Teknologi Informasi (TI) bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran fungsi Sistem Informasi (SI). Pentingnya penggunaan TI tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, tetapi juga sudah merambah ke instansi pemerintah. Adanya *e-government*, *e-procurement*, *e-transaction* dan aktivitas melalui TI antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, antara pemerintah dengan sektor swasta maupun antara pemerintah di negeri ini dengan pemerintah di negeri lainnya merupakan implementasi penggunaan TI di instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya penggunaan TI, maka penyelenggaraan negara menuju *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin mengalami peningkatan menuju upaya yang optimal. Adanya hal tersebut harapan menuju tata kelola pemerintah (*good governance*) yang baik dapat terwujud sesuai keinginan bersama (Ardi Hamzah, 2009).

Adanya penggunaan TI dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut para aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. Perubahan tersebut biasanya tidak berjalan dengan mudah dikarenakan adanya berbagai ekspektasi dan hambatan dari para aparatur. Dengan perubahan tersebut, ekspektasi kinerja juga mengalami kenaikan sehingga kinerja dari aparatur tersebut juga mengalami peningkatan (Ardi Hamzah, 2009).

Pentingnya penggunaan teknologi informasi mulai disadari oleh organisasi modern, terutama dalam era globalisasi dimana perusahaan dituntut untuk semakin kompetitif dan berdaya saing. Oleh karena itu menjadi penting untuk memacu tingkat pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi di organisasi. Keberadaan teknologi informasi tidak bisa dilepaskan perannya dalam proses pengerjaan tugas karyawan. Penggunaan suatu teknologi informasi diharapkan dapat memberikan nilai lebih terhadap karyawan seperti mempercepat waktu pengerjaan suatu penugasan dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan. (Mahendra dan Affandy: 2013)

Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi pada instansi pemerintahan mulai dari mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public services*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Peran strategis sistem informasi adalah membantu pihak manajemen

dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan (Handayani, 2007).

Penggunaan sistem informasi pada organisasi saat ini telah mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Westland dan Clark (2000) dalam Handayani (2007) bahwa penggunaan sistem dalam organisasi meningkat secara dramatis. Peningkatan ini selain dikarenakan tuntutan organisasi modern, juga disebabkan oleh masyarakat yang haus akan informasi. Sistem informasi akan membantu organisasi untuk menyajikan informasi secara cepat, akurat dan terbuka seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat saat ini mempunyai pemikiran maju yang lambat laun akan meninggalkan cara-cara manual dan membuat terobosan baru untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, perlu disadari bahwa pembangunan suatu sistem informasi pada organisasi memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan sistem informasi diperlukan perencanaan yang matang sehingga sistem informasi akan berkeja sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan baik (Mahendra dan Affandy: 2013).

Dengan menggunakan sistem informasi, diharapkan sebuah entitas memperoleh keunggulan bersaing. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, integrasi dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Dengan adanya berbagai keunggulan ini, maka semakin banyak pula pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi. Adapun saat ini pihak-pihak yang

menggunakan sistem informasi antara lain individu, perusahaan, pemerintah dan UMKM (Mahendra dan Affandy: 2013).

Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi. Salah satu implementasi pemerintah yang menerapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari di bidang akuntansi adalah penggunaan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (www.djkd.kemendagri.go.id: 2015).

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan tentunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal inilah yang membedakan dari perusahaan komersial yang bertujuan utama mendapatkan laba. Dengan menggunakan SIPKD, pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan masa lalu, mengambil keputusan sekarang dan membantu membuat perencanaan masa mendatang (fungsi manajerial) yang merupakan salah satu upaya dalam melayani masyarakat. Menurut Gade

(1993) dalam Mahendra dan Affandy (2013), sistem akuntansi pemerintah harus memenuhi dua hal, yaitu: (1). Menyajikan laporan keuangan secara wajar dan dengan ungkapan yang lengkap atas posisi keuangan dan hasil kegiatan baik dari dana maupun kelompok perkiraan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, (2). Menetapkan dan menunjukkan bahwa taat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada instansi pemerintah atau organisasi sektor publik di lingkup Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya objek penelitian pada organisasi sektor publik dikarenakan sektor ini sedang dituntut untuk berbenah dan menjadi perhatian masyarakat agar dapat menjadikan kinerjanya lebih baik dan transparan terutama dalam hal keuangan. Selain itu, sektor ini juga telah mengimplementasikan penggunaan sistem informasi hampir di seluruh kegiatan operasionalnya, salah satunya dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di bidang keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SIPKD) (Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta)”** merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Mahendra dan Affandy (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar)”.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Ekspektasi Kinerja berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pengelola keuangan daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta?
2. Apakah Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap minat pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta?
3. Apakah Faktor Sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Ekspektasi Kinerja terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pengelola keuangan daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta.
2. Untuk menguji pengaruh Ekspektasi Usaha terhadap minat pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta.

3. Untuk menguji pengaruh Faktor Sosial terhadap minat pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat bagi instansi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai input bagi pimpinan atau pengambil kebijakan di instansi sektor publik khususnya Pemerintah Kota Surakarta untuk pengembangan sistem informasi dan juga untuk pengembangan literatur Sistem Informasi pada instansi sektor public.

2. Manfaat bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan dan memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai minat pemanfaatan sistem informasi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis dan membandingkan teori dengan praktek yang berada di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan tentang pengertian ekspetasi kinerja, ekspetasi usaha, faktor social, minat pemanfaatan SIPKD, hubungan antara ekpetasi kinerja dengan minat pemanfaatan SIPKD, hubungan antara ekspetasi usaha dengan minat pemanfaatan SIPKD, hubungan antara faktor social dengan minat pemanfaatan SIPKD, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penellitian dan pembahasan yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.